

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran dan informasi terkait lokasi penelitian yang dilaksanakan. Dengan ini diharapkan pembaca dapat mengetahui dengan mudah untuk memastikan lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Meningat lokasi penelitian ini tidak semua orang mengetahuinya, sehingga diperlukan deskripsi dan penjelasan secara rinci.

#### 3.1 Sejarah

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir (La Kai) dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa'a, Wadu Nocu, Wadu Tunti ("batu bertulis") di Dusun Padende, Kecamatan Donggo, menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan terutama dari Kabupaten Gowa, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Kerajaan Bima dahulu terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah, yaitu:

Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah

Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan

Ncuhi Bolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat

Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara

Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur

Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara. Pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bima, cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang putra, yaitu:

Darmawangsa

Sang Bima

Sang Arjuna

Sang Kula

Sang Dewa

Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat di sebuah pulau kecil di sebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan, yakni Kerajaan Bima dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan Hadat dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa'a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima menuju timur, takhta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud sebagai pewaris takhta datang kembali ke Bima pada abad 14-15 M.

Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Bima juga mengalami perkembangan ke arah yang lebih maju. Dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

No.22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004, Kabupaten Bima telah memanfaatkan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi daerah, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2 Deskripsi Wilayah

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 438.940 Ha atau 4.389,40 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km. Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km<sup>2</sup> atau 29.26% dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km.

Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Laut Flores
- 2) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- 3) Sebelah Timur : Selat Sape
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Secara administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan, 191 desa, 782 Dusun, 1.048 Rukun Warga (RW) dan 2.475 Rukun Tetangga (RT), dengan wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tambora dengan luas 62.782 ha atau sebesar 14,30%, sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa.

### 3.3 Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Bima

#### 3.2.1 Geografis

Wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Woha. Secara geografis terletak pada:

1. Barat – Timur : 1180 44' – 1190 22' Bujur Timur
2. Utara – Selatan : 080 08' – 08 057' Lintang Selatan



*Gambar 3. 1 Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB*

#### 3.4 Topografi

Secara topografis wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk kedepan, akan menyebabkan daya dukung lahan semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dari pertanian tradisional ke pertanian wirausaha dan sektor industri kecil dan perdagangan. Dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut,

sedangkan daerah yang terendah adalah Kecamatan Sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5 m dari permukaan laut.

Di Kabupaten Bima terdapat lima buah gunung, yakni:

- Gunung Tambora di Kecamatan Tambora
- Gunung Sangiang di Kecamatan Wera
- Gunung Maria di Kecamatan Wawo
- Gunung Lambitu di Kecamatan Lambitu
- Gunung Soromandi di Kecamatan Donggo, merupakan gunung tertinggi di wilayah ini dengan ketinggian 4.775 m.

### **3.5 Demografi**

#### **3.4.1 Keadaan Sosial Budaya Kabupaten Bima**

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima berasal dari etnis atau Suku Mbojo (BIMA). Sedangkan sisanya berasal dari Suku Bugis, Jawa, Sasak, Bali, dan sebagainya. Banyaknya jumlah suku yang terdapat. Di Kecamatan Bolo dan Desa sampel di karenakan wilayah sangat terbuka, sehingga memudahkan suku lainnya masuk dan tinggal serta menetap. Suku Mbojo merupakan suku asli yang mendiami Kabupaten Bima, adat istiadat dan budaya masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Hal ini terlihat dengan adanya budaya pernikahan yang didahului oleh pelamaran yang hingga saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Masalah sosial budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di wilayah Suku Mbojo adalah tradisi gotong-royong dalam berbagai kegiatan sosial seperti bersih-bersih masjid, mushola. Agama yang dianut sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima adalah 62 beragama islam, sedangkan sisanya beragama Kristen, hindu, budha dan sebagainya.

#### **3.4.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat Bima**

Kondisi perekonomian merupakan tolak ukur untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu daerah harus didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian yang memadai. Daerah ini cukup tersedia lembaga ekonomi seperti koperasi

dan bank. Lembaga-lembaga inilah yang memberikan dukungan modal terhadap pengembangan usaha masyarakat terutama di sektor pertanian.

Keberadaan sarana perekonomian memegang penting dalam suatu wilayah. Pasar ataupun jenis tempat perdagangan lainnya merupakan cara perekonomian yang digunakan sebagai tempat bertamunya produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian seperti bahan baku dan bahan penolong serta tempat memasarkan produk jadi.

Kabupaten Bima menghadapi berbagai tantangan dalam upayanya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dengan perkiraan 17,9% dari populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator pembangunan manusia Kabupaten, seperti tingkat melek huruf dan akses ke perawatan kesehatan, juga relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi. Kabupaten Bima sering juga mengalami berbagai tantangan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan kekurangan air. Tantangan-tantangan ini diperparah oleh rentannya Kabupaten terhadap bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan kesejahteraan sosial Kabupaten.

### **3.6 Profil DPRD**

#### **3.5.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima**

DPRD Kabupaten Bima adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Bima dilakukan melalui Pemilihan Legislatif yang merupakan pejabat pemerintahan Kabupaten. DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki fungsi a) Pembentukan Peraturan Daerah. b) Anggaran; dan c) Pengawasan.

Anggota DPRD Kabupaten Bima periode (2019-2024) sebanyak 54 orang yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten Bima merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima beralamat

di Jl. Gatot subroto no. 6 Raba Bima telp./Fax 0374-43012-43355-(0374)-43355.

### 3.5.2 Fraksi DPRD Kabupaten Bima

komposisi anggota DPRD Kabupaten Bima dalam dua periode

Partai politik	Jumlah kursi dalam priode 2019-2024
PKB	2
Gerindra	5
PDI-P	3
Golkar	9
NasDem	4
PKS	4
PPP	5
PAN	6
Hanura	3
Deokrat	4
PBB	1
Jumla Anggota	<b>45</b>
Jumla Partai	<b>11</b>

*Sumber DPRD kabupaten Bima*

Berdasarkan gambar diatas menandakan bahwa komposisi anggota DPRD seluruh anggota DPRD berasal dari partai politik yang berbeda-beda dari 11 partai politi, yang mayoritas jadi anggota DPRD kabupaten bima iyalah dari Partai Golongan Karya (Golkar), memiliki 9 anggota, sementara dari partai lain bisa dikatakan setara karna masing-masing memiliki anggota sebagai DPRD 1-6 anggota.

### 3.5.3 Alat dan Kelengkapan DPRD kabupaten Bima

DPRD mempunyai Pimpinan, Unsur Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua dengan masa jabatan selama 5 tahun. Anggota DPRD Kabupaten Bima sebelum memangku masa jabatannya mengucapkan sumpah/janji anggota DPRD secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bagi anggota yang berhalangan hadir, maka yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.

DPRD Kabupaten Bima memiliki alat kelengkapan yang telah ditetapkan sesuai susunan dan komposisinya. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bima meliputi:

Anggota DPRD yang memiliki anggota 54 orang, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 164 ayat (1) bahwa DPRD memiliki 4 pimpinan yaitu 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua, berikut Pimpinan DPRD Kabupaten Bima meliputi:

Muhammad Putera Feryandi (Ketua)

Muhammad Aminullah (Wakil Ketua)

Yasin (Wakil Ketua)

Hj. Nurhayati (Wakil Ketua)

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, DPRD Kabupaten Bima mempunyai unsur staf berupa pegawai pemerintah. Tugas pokok dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bima adalah memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bima menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD keudian Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, yang terakhir Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

## 1. Komisi-Komisi

Komisi I, bidang Pemerintahan dan Hukum. Komisi II, bidang Keuangan dan perbankan; dan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI. Komisi III, bidang Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Patungan, Sumbangan Pihak Ketiga, Aset-aset Daerah Kabupaten Natuna, Dunia Usaha dan Penanaman Modal. Komisi IV, bidang ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, Kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan, social, kesehatan dan keluarga Berencana, peranan wanita, transmigrasi, perpustakaan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tugas dari komisi sebagai berikut:

Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Melakukan kunjungan kerja yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

## 2. Badan Anggaran

### Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bima adalah:

Visi: Menjadikan DPRD sebagai lembaga penyambung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

menuju visi Kabupaten Bima yaitu terwujudnya Kabupaten Bima sebagai Daerah dengan potensi unggulan.

Misi

Memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik fisik maupun mental spiritual. Memperkokoh peran dan fungsi DPRD yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan tradisi profesional dalam bidang-bidang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Memperjuangkan terwujudnya supremasi hukum di Daerah, Memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan masyarakat.

1) Struktur Organisasi

**Bagan 1. 2 Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bima**

